



Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun

Affriliani^{1✉}, Friscilla Wulan Tersta², Linardo Pratama³

Universitas Jambi, Indonesia^{1,2,3}

e-mail : affriliani84@gmail.com¹, friscillawulant@unja.ac.id², linardopratama@unja.ac.id³

Abstrak

Pendidikan gratis bertujuan untuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dalam mendukung program wajib belajar 12 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan gratis dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun di sekolah menengah atas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus di SMA Negeri 1 Muaro Jambi dan SMA Negeri 11 Muaro Jambi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis telah meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, tantangan masih ditemukan dalam keterbatasan anggaran operasional, kurangnya fasilitas pendukung, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai cakupan pendidikan gratis. Selain itu, keterlibatan stakeholder seperti kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan pendidikan gratis berperan penting dalam mendukung wajib belajar 12 tahun, namun masih perlu adanya perbaikan dalam aspek pendanaan, sarana-prasarana, serta sosialisasi kebijakan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan Gratis, Wajib Belajar 12 Tahun, Implementasi Kebijakan, Evaluasi CIPP

Abstract

Free education aims to ensure equal access to education for all Indonesian citizens, particularly in supporting the 12-year compulsory education program. This study aims to analyze the implementation of free education policies in realizing 12-year compulsory education and to identify the challenges encountered in implementing these policies in senior high schools. The research employs a qualitative approach with a case study conducted at SMA Negeri 1 Muaro Jambi and SMA Negeri 11 Muaro Jambi. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed using the CIPP evaluation model (Context, Input, Process, Product). The findings indicate that the free education policy has successfully improved educational access, especially for students from underprivileged families. However, challenges remain, such as limited operational budgets, insufficient supporting facilities, and a lack of public awareness regarding the scope of free education. Furthermore, the involvement of stakeholders, including school principals, teachers, and parents, significantly influences the effectiveness of this policy. The study concludes that while the free education policy plays a crucial role in supporting the 12-year compulsory education program, improvements are still needed in funding allocation, infrastructure, and policy dissemination to the public.

Keywords: Free Education Policy, 12-Year Compulsory Education, Policy Implementation, CIPP Evaluation

Copyright (c) 2025 Affriliani, Friscilla Wulan Tersta, Linardo Pratama

✉ Corresponding author :

Email : affriliani84@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v7i2.8014>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan guna mencapai kesejahteraan sosial dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga menjadi sarana dalam membentuk karakter, keterampilan, dan kesiapan individu dalam menghadapi tantangan global (Rahman *et al.*, 2022). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang inklusif dan merata menjadi prioritas utama bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan belajar yang setara. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang inklusif dan merata menjadi prioritas utama bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan belajar yang setara (Suryana, 2020).

Salah satu permasalahan utama dalam pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Banyak sekolah di daerah terpencil mengalami keterbatasan sarana dan prasarana, yang berdampak pada kualitas pembelajaran (Juventia & Yuan, 2024). Selain itu, rendahnya tingkat kesejahteraan guru dan kurangnya tenaga pendidik berkualitas juga menjadi kendala dalam mencapai pendidikan yang merata (Balqis & Putri, 2024).

Kemiskinan menjadi faktor utama yang menghambat akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,90 juta jiwa, yang sebagian besar mengalami kesulitan dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka (Margiyanti & Maulia, 2023). Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan pendidikan gratis melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), realitanya masih banyak siswa yang mengalami kendala dalam memperoleh fasilitas pendidikan yang memadai (Lisiani, 2018).

Program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 (Kusuma *et al.*, 2024). Namun, kebijakan pendidikan gratis tidak serta-merta bebas dari tantangan. Studi oleh Aiska (2017) mengungkapkan bahwa masih terdapat ketidakseimbangan dalam alokasi anggaran pendidikan, kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai cakupan pendidikan gratis. Kesalahpahaman ini sering kali menimbulkan ekspektasi bahwa pendidikan benar-benar gratis tanpa adanya biaya tambahan, padahal kenyataannya, beberapa komponen seperti seragam dan buku pelajaran masih menjadi tanggung jawab orang tua (Wolio *et al.*, 2022).

Kramer *et al.* (2024) juga meneliti efektivitas kebijakan pendidikan gratis di Bantul, Yogyakarta, dan menemukan bahwa kebijakan ini berhasil meningkatkan partisipasi siswa, tetapi masih mengalami kendala dalam hal alokasi anggaran dan keterbatasan fasilitas. Selain itu, penelitian oleh Lidda *et al.* (2022) menunjukkan bahwa meskipun biaya pendidikan utama telah dihapuskan, beberapa biaya tambahan seperti seragam dan buku latihan tetap harus ditanggung oleh siswa. Hal ini juga ditegaskan oleh Rolos *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa pendidikan gratis lebih mengacu pada penghapusan biaya pembelajaran dan pembangunan sekolah, namun tidak mencakup seluruh kebutuhan siswa secara keseluruhan.

Implementasi kebijakan pendidikan gratis di sekolah-sekolah masih mengalami berbagai kendala, khususnya dalam hal pendanaan dan infrastruktur. Matondang *et al.* (2024) menemukan bahwa meskipun kebijakan ini meningkatkan akses pendidikan, daerah perdesaan masih mengalami kesulitan dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang layak. Selain itu, keterbatasan anggaran operasional sering kali membuat sekolah harus mencari solusi alternatif untuk menutupi kebutuhan yang tidak tercakup dalam dana BOS (Muhdi *et al.*, 2017). Sekolah sering kali mengadakan rapat dengan komite sekolah dan masyarakat

untuk mencari solusi bersama (Tumundo et al., 2023). Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam alokasi anggaran untuk berbagai kebutuhan siswa (Sanda & Gistituati, 2023).

Meskipun beberapa penelitian telah dilakukan, masih terdapat kesenjangan dalam kajian terkait implementasi kebijakan pendidikan gratis di tingkat sekolah menengah atas, khususnya di daerah Muaro Jambi. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada tingkat pendidikan dasar dan sekolah kejuruan, sementara implementasi kebijakan ini di sekolah menengah atas belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Selain itu, pendekatan evaluasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian sebelumnya cenderung terbatas pada aspek administratif dan belum banyak menggunakan model evaluasi yang komprehensif, seperti model CIPP (Context, Input, Process, Product), yang dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai efektivitas kebijakan ini dalam berbagai aspek (Winaryati et al., 2021).

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan wawasan lebih dalam mengenai implementasi kebijakan pendidikan gratis dalam mewujudkan program Wajib Belajar 12 Tahun di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 11 Muaro Jambi. Dengan menggunakan model evaluasi CIPP, penelitian ini dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan ini serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan berkelanjutan guna mendukung pemerataan akses pendidikan di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2015) bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam makna yang dianggap penting oleh individu atau kelompok dalam konteks sosial atau kemanusiaan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang dianalisis secara induktif dari hal-hal spesifik menuju pemahaman yang lebih umum. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan pendidikan gratis telah diterapkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilannya (Stufflebeam dalam Winaryati et al., 2021). Di mana model ini menilai implementasi kebijakan berdasarkan empat aspek utama, yaitu (1) Context, yang menilai kebutuhan, tujuan, dan latar belakang kebijakan; (2) Input, yang mengevaluasi sumber daya dan strategi yang digunakan dalam implementasi kebijakan; (3) Process, yang mengkaji sejauh mana kebijakan telah dijalankan sesuai rencana serta tantangan yang dihadapi selama pelaksanaannya; dan (4) Product, yang mengukur hasil serta dampak kebijakan terhadap akses pendidikan bagi siswa. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas kebijakan pendidikan gratis dalam mendukung program Wajib Belajar 12 Tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pendidikan gratis merupakan strategi pemerintah dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun guna meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan gratis di SMA Negeri 1 Muaro Jambi dan SMA Negeri 11 Muaro Jambi dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggambarkan efektivitas serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini telah membantu mengurangi beban biaya pendidikan bagi masyarakat, masih terdapat tantangan

dalam aspek infrastruktur, dan pemahaman masyarakat mengenai cakupan biaya yang ditanggung pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan yang lebih optimal serta sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan mencapai tujuannya secara efektif.

Hasil

Hasil Temuan penelitian ini disusun berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan wali murid. Data diperoleh dengan analisis menggunakan evaluasi model CIPP (*Context, Input, Process, Product*).

A. Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun.

1. Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)

SMA 1 Muaro Jambi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan gratis di sekolah ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan pendidikan gratis membantu orang tua siswa dalam menghadapi tantangan dalam biaya pendidikan, dan mendukung terwujudnya wajib belajar 12 tahun.

Sedangkan di SMA Negeri 11 Muaro Jambi menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis juga telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, wali murid merasa terbantu secara finansial, tetapi sekolah masih memiliki mekanisme sumbangan sukarela.

2. Evaluasi Input (*Input Evaluation*)

SMA Negeri 1 Muaro Jambi menunjukkan bahwa Dana BOS digunakan menjadi sumber utama pendanaan operasional sekolah, mencakup pengadaan buku pelajaran, mendukung kegiatan pembelajaran dan kebutuhan dasar sekolah lainnya. Fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, komputer dan sarana olahraga sudah tersedia, bahkan untuk mobil komite juga tersedia yang digunakan untuk transportasi operasional sekolah. Warga sekolah sangat mendukung implementasi kebijakan pendidikan gratis dan berkolaborasi dalam mencari solusi untuk masalah yang dihadapi dengan melakukan musyawarah dengan melibatkan sekolah, komite dan wali murid.

Sedangkan, di SMA Negeri 11 Muaro Jambi menunjukkan bahwa Dana BOS sebagai sumber daya utama membantu dalam memenuhi kebutuhan operasional sekolah, sekolah juga memanfaatkan program beasiswa PIP dan Dumisake dari pemerintah untuk membantu siswa kurang mampu. Fasilitas seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan buku pelajaran sudah tersedia melalui dana BOS. Namun fasilitas seperti lapangan olahraga dan mushola masih belum memadai. Meskipun demikian, warga sekolah tetap mendukung implementasi kebijakan pendidikan gratis, terutama dalam mendukung efisiensi dan pengelolaan anggaran dengan baik, memastikan pembelajaran berjalan dengan baik, serta terkadang siswa juga ikut serta dalam kegiatan sosial dalam penggalangan dana sukarela.

3. Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

SMA Negeri 1 Muaro Jambi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan gratis dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan dana BOS, program beasiswa seperti PIP dan Dumisake, serta melibatkan sekolah, komite dan wali murid dalam melakukan musyawarah. Namun ada tantangan dalam implementasinya yaitu mengenai keterbatasan dana, serta tantangan lain seperti rendahnya motivasi siswa dan rendahnya keterlibatan orang tua siswa dalam mendukung semangat belajar anak mereka. Keterlibatan guru dan staff pendidik berperan dalam memastikan pembelajaran berjalan dengan lancar serta membimbing siswa menyelesaikan masalah secara bertahap, mulai dari wali kelas, guru bimbingan konseling, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan sampai ke kepala sekolah.

Sedangkan, di SMA Negeri 11 Muaro Jambi menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis di implementasikan dengan memaksimalkan penggunaan dana BOS untuk pengadaan buku, dan fasilitas belajar siswa. Sekolah berfokus pada efisiensi pengelolaan anggaran dan mengusulkan bantuan kepemerintah untuk mengatasi keterbatasan sarana. Tantangan yang dihadapi disekolah yaitu mengenai keterbatasan anggaran, penyediaan fasilitas yang kurang memadai, faktor ekonomi yang menyebabkan siswa harus membantu orang tuanya bekerja, sehingga mempenagruhi fokus belajar mereka, serta kesalahpahaman masyarakat mengenai cakupan pendidikan gratis. Namun dengan keterlibatan guru dan staff pendidik yang aktif dalam memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar, mendukung keberhasilan kebijakan pendidikan gratis.

4. Evaluasi Product (*Product Evaluation*)

SMA Negeri 1 Muaro Jambi menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis dapat meningkatkan partisipasi siswa, dengan jumlah pendaftar melebihi kapasitas disekolah. Banyak siswa yang memilih sekolah karena bebas biaya. Kebijakan pendidikan gratis berdampak pada peningkatan jumlah siswa, terutama pada kalangan keluarga kurang mampu. namun tantangan muncul pada kurangnya keterlibatan orang tua dalam mendorong siswa untuk belajar. Kebijakan pendidikan gratis mendukung tercapainya wajib belajar 12 tahun, meskipun masih ada tantangan yang dihadapi.

Sedangkan, di SMA Negeri 11 Muaro Jambi menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi siswa tidak terlalu signifikan, atau naik turun, karena bergantung pada ketersediaan fasilitas dan faktor biaya personal siswa. Meskipun tantangan dalam faktor ekonomi masih ada, kebijakan pendidikan gratis dianggap solusi yang tepat untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu untuk bisa melanjutkan pendidikan sampai kejenjang sekolah menengah atas.

B. Identifikasi Tantangan Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun.

1. SMA Negeri 1 Muaro Jambi

Mengalami beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun. Diantaranya yaitu, Keterbatasan dana, rendahnya motivasi siswa dan keterlibatan orang tua siswa dalam mendorong semangat belajar anaknya rendah.

2. SMA Negeri 11 Muaro Jambi

Mengalami beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun. Diantaranya yaitu, keterbatasan anggaran, keterbatasan infrastruktur, faktor ekonomi siswa dan kesalahpahaman masyarakat mengenai cakupan pendidikan gratis.

Pembahasan

A. Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun.

Penelitian ini menggunakan evaluasi model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam sebagai pendekatan sistematis dalam mengevaluasi implementasi kebijakan pendidikan gratis di SMA Negeri 1 Muaro Jambi dan SMA Negeri 11 Muaro Jambi.

Pada Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis diterapkan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu serta mendukung wajib belajar 12 tahun. Secara regulasi, kebijakan ini telah diakomodasi dalam peraturan pemerintah dan mendapatkan dukungan dari sekolah serta masyarakat. Namun, pemahaman masyarakat mengenai cakupan kebijakan ini masih belum merata. Tantangan lain yang ditemukan adalah masih adanya stigma sosial terhadap siswa dari latar belakang ekonomi rendah yang mendapat manfaat dari kebijakan ini, yang dapat memengaruhi motivasi belajar mereka. Temuan ini sejalan dengan penelitian Leoneto (2017) yang

menemukan bahwa kebijakan pendidikan gratis di Palembang secara umum mendukung peningkatan partisipasi siswa, meskipun menghadapi kendala implementasi. Selain itu, program ini sangat bergantung pada peran kepala sekolah dan guru dalam mengkomunikasikan manfaat serta batasan kebijakan ini kepada masyarakat.

Pada Evaluasi Input (*Input Evaluation*) Implementasi kebijakan didukung oleh sumber dana seperti BOS, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Dumisake. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana, serta keterlambatan pencairan dana masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Sumber daya manusia dalam bentuk tenaga pendidik juga menjadi perhatian utama, karena masih terdapat sekolah yang kekurangan guru mata pelajaran tertentu yang menyebabkan efektivitas pembelajaran menurun. Penelitian Mustikawati dan Jannah (2019) juga menunjukkan bahwa meskipun pendidikan gratis berjalan sesuai kebijakan, keterlambatan pencairan dana dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai cakupan biaya yang ditanggung masih menjadi kendala. Selain itu, adanya kebutuhan tambahan seperti peningkatan kapasitas guru, pengadaan buku tambahan, serta penyediaan ruang kelas yang lebih layak masih menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini.

Pada Evaluasi Proses (*Process Evaluation*) Implementasi kebijakan di kedua sekolah berjalan melalui koordinasi yang baik antara kepala sekolah, guru, dan wali murid. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal transparansi anggaran dan efektivitas pengelolaan dana. Selain itu, mekanisme pelaporan dan pengawasan masih perlu ditingkatkan agar alokasi dana benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah. Hal ini sejalan dengan penelitian Aiska (2017) yang menemukan bahwa meskipun kebijakan pendidikan gratis di Blitar telah diterapkan, masih ada tantangan berupa kurangnya tenaga pendidik dan keterbatasan infrastruktur sekolah. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini masih lemah, sehingga sering kali terjadi ketidaksesuaian antara anggaran yang diberikan dan pemanfaatannya di lapangan.

Pada Evaluasi Produk (*Product Evaluation*) menunjukkan bahwa Kebijakan pendidikan gratis berhasil meningkatkan partisipasi siswa, terutama dari keluarga kurang mampu. Namun, masih ada tantangan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa serta memastikan bahwa program ini berjalan secara berkelanjutan. Temuan ini relevan dengan penelitian Suyudi *et al*, (2023) yang menunjukkan bahwa keterbatasan dana dan sumber daya tetap menjadi tantangan utama dalam implementasi pendidikan gratis di SMK Negeri. Selain itu, efektivitas kebijakan ini dalam jangka panjang masih perlu dikaji lebih dalam, terutama dalam aspek peningkatan mutu pembelajaran dan keberlanjutan pendanaan dari pemerintah.

B. Identifikasi Tantangan Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun.

Meskipun kebijakan pendidikan gratis telah memberikan dampak positif, penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan dalam implementasinya. Keterbatasan fasilitas seperti lapangan olahraga dan laboratorium yang memadai, yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran. Hal ini serupa dengan temuan Rolos *et al*, (2022) yang mengungkapkan bahwa kurangnya fasilitas pendidikan menjadi kendala utama dalam keberhasilan kebijakan pendidikan gratis. Keterbatasan anggaran sering kali menghambat implementasi kebijakan secara optimal. Studi Leoneto (2017) juga menemukan bahwa keterlambatan dana dan kurangnya pengawasan terhadap kebijakan pendidikan gratis menjadi faktor yang menghambat keberlanjutan program.

Kesalahpahaman mengenai cakupan kebijakan pendidikan gratis juga turut menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis. Beberapa orang tua menganggap bahwa pendidikan gratis berarti tidak ada biaya sama sekali, sehingga mereka enggan berkontribusi dalam pengadaan fasilitas tambahan atau kegiatan ekstrakurikuler. Studi Wolio *et al*, (2022) juga menemukan bahwa kesalahpahaman masyarakat mengenai cakupan pendidikan gratis sering kali menghambat partisipasi mereka dalam mendukung kebijakan. Meskipun kebijakan ini meningkatkan angka partisipasi sekolah, masih ada tantangan dalam membangun motivasi siswa untuk belajar secara mandiri dan optimal. Penelitian Lidda *et al*, (2022) juga menyoroti bahwa

kurangnya motivasi siswa akibat faktor sosial-ekonomi menjadi salah satu kendala dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis.

SIMPULAN

Kebijakan pendidikan gratis memiliki peran penting dalam meningkatkan akses pendidikan dan mendukung wajib belajar 12 tahun, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Melalui evaluasi model CIPP, ditemukan bahwa kebijakan ini telah berjalan dengan baik di SMA Negeri 1 Muaro Jambi dan SMA Negeri 11 Muaro Jambi, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Implementasi kebijakan ini telah membantu mengurangi beban finansial orang tua dan meningkatkan partisipasi siswa dalam pendidikan menengah. Namun, keterbatasan anggaran, kurangnya infrastruktur pendukung, serta rendahnya keterlibatan orang tua dalam mendukung pendidikan anak masih menjadi kendala utama yang perlu diatasi agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, serta wali murid di SMA Negeri 1 Muaro Jambi dan SMA Negeri 11 Muaro Jambi yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiska, I. S. (2017). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kota Blitar (Studi Implementasi Perwali No 8 Tahun 2015 Tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun)*. 8.
- Balqis, P., & Putri, D. A. (2024). *Pengaruh Pemberlakuan Program SPP Gratis 12 Tahun Terhadap Perekonomian Indonesia*. 1(2).
- Creswell John W., (2015), *Qualitative inquiry & Research Design, Choosing Among Five Approachs*, Third Edition, by SAGE. Alih bahasa Ahmad Lintang Lazuardi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Iis Margiyanti, & Siti Tiara Maulia. (2023). Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun. *Jurnal Pendidikan Dan Sastra Inggris*, 3(1), 199–208. <https://doi.org/10.55606/jupensi.v3i1.1509>
- Juventia, D., & Yuan, S. A. (2024). Ketimpangan Sosial Dalam Bidang Pendidikan dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 2(1), 418–427. <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2335>
- Kramer, P. W. U. B. E. E. (2024). *Fee-Free education in Indonesia: A review of fifteen-years fee-free Education Law And The Reality Application And Needs In Bantul District*, Yogyakarta. 3(10), 941–951.
- Kusuma, J. W., Hamidah, H., Umalihayati, U., & Rini, P. P. (2024). Mengurai Benang Kusut Kebijakan Pendidikan Indonesia: Sebuah Literature Review Analitik. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1810–1826. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2772>
- Leoneto, B. A. (2017). Evaluasi Program Pendidikan Gratis. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 110(9), 1689–1699.
- Lidda, M. A. A., Tajuddin, M. S., & Irfan, I. (2022). Implementasi Program Pendidikan Gratis di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Malunda (Smpn4 Malunda) Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. *Mitzal*, 7(1), 80–91.

- 425 *Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun - Affriliani, Friscilla Wulan Tersta, Linardo Pratama*
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v7i2.8014>
- Lisiani, T. Y. (2018). Implementasi program pendidikan gratis di SMP Negeri 3 Kota Blitar (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang).
- Matondang, A. K., Sembiring, A. B., & Yanti, I. E. (2024). *Implementasi Kebijakan Mengenai Pendidikan Gratis Di Indonesia Implementation Of Policy Regarding Free Education In Indonesia*. 3150, 178–184.
- Muhdi, M., Kastawi, N. S., & Widodo, S. (2017). Teknik Pengambilan Keputusan Dalam Menentukan Model Manajemen Pendidikan Menengah. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 135. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p135-145>
- Mustikawati, I., & Jannah, M. (2019). *Analisis Implementasi Program Pendidikan Gratis Dimadrasah Ibtidaiyah Darul Ibad Ajung Jember*. 19(1), 70–85.
- Rahman, A., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani. (2022). Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1–8.
- Rolos, M. C., Posumah, J. H., & Londa, V. Y. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, VIII(113), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/38156/34866>
- Sanda P.H, F., & Gistituati, N. (2023). Evaluasi implementasi program pendidikan gratis di kota Padang Sidempuan. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 195. <https://doi.org/10.29210/1202322770>
- Suryana, S. (2020). Permasalahan Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan. *Edukasi*, 14(1). <https://doi.org/10.15294/edukasi.v14i1.971>
- Suyudi, I., Sudadio, S., & Suherman, S. (2023). *Pelaksanaan Kebijakan Gubernur Tentang Pendidikan Gratis Sekolah Kejuruan Di Provinsi Banten*.
- Tumundo, E. C., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2023). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Governance*, 3(1), 1–7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/38156/34866>
- Winaryati, E., Munsarif, M., Mardiana, & Suwahono. (2021). Model-model evaluasi aplikasi dan kombinasinya. In *Penerbit KBM Indonesia* (Vol. 1, Issue 69).
- Wolio, A., Saidah, U., & Rajab, L. (2022). Hubungan Implementasi Biaya Pendidikan Gratis dengan Minat Belajar Siswa. *PEDAGOGIC: Indonesian Journal of Science Education and Technology*, 1(1), 12–26. <https://doi.org/10.54373/ijset.v1i1.58>